

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007).
- _____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- B. Mayo, Hendry, An Introduction to Democratic Theory. (New York: Oxford University Press, 1960).
- B. Tjenreng, Zubakhrum, M. Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak. (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020).
- Farida Indrati S, Maria, Ilmu Perundang-Undangn 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan). (Yogyakarta: Kanisus, 2007).
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, Penjabat Kepala Daerah. (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)
- Geys, Benny, "Explaining Voter Turnout; a Review of Aggregate-Level Research" dalam *Electoral Studies* 25, 2006
- Jeddawi, Murtir, Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: Total Media, 2012)
- Keliat, Makmur. Reformasi Kepolisian Dalam TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik, (Jakarta: Program Magister Studi Pertahanan ITB dan Imparsial; 2008).
- Mahfud, Mohhammad, Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Prihatmoko, Joko J., Pemilihan Kepala Daerah Langsung. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. (Yogyakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010).
- _____, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011).
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1981).
- Soehino, Ilmu Negara. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005).
- Suteki dan Galang, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Triwulan Tutik, Titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010).
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. cetakan ke empat, (Jakarta, 1997).

JURNAL

- Abdulkadir B.Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik), Volume XXI No.2 April-Juni 2005
- Fransisca Adelina, Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018
- Mohammad Ilham Agang, *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah di negara Republik Indonesia*. BOLREV (Borneo Law Review) Vol. 2 Issue 2. 2018
- Nandang Alamsah Deliarnoor, *Problematika pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Transisi Pemerintah (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)*. CosmoGov, Vol.1 No.2, Oktober 2015
- Nur Rohim Yunus, *Pengangkatan Perwira Aktif Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah*, ADALAH: Bulletin Hukum & Keadilan, Vol. 2 No. 6, 2018
- Tohadi, *Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang Berasal Dari Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Universitas Pamulang: Replik, Vol. 6 No.1, Maret 2018.

Ronald Limanjaya dan Tatang Ruchimat, Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 No.2, Desember 2020.

Saeful Kholik dan Carto, *Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tentang Persyaratan Penangkatan Penjabat Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah*, *Jurnal Universitas Wiralodra Indramayu*, 2018.

Yusuf Djabbar, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Gubernur Menurut UU No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.3, No.1, Januari 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005).

Penjabat Gubernur dari Perwira Polri Diyakini lebih aman, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/19590701/penjabat-gubernur-dari-perwira-polri-diyakini-membuat-pilkada-lebih-aman>, diakses di Semarang pada 27 Januari 2021 .

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses di Semarang pada 3 Februari 2021.

9 Provinsi ini Gelar Pilkada Desember 2015, <https://nasional.tempo.co/read/650960/9-provinsi-ini-gelar-pilkada-desember-2015/full&view=ok>, diakses di Semarang pada 25 Januari 2021.